

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA TERNATE

Fasri Bachmid¹, Ariyanto²

^{1,2}Perencanaan Wilayah dan Kota, Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar
Email: fasribachmid.71@gmail.com

Diterima (received): 08 Agustus 2017

Disetujui (accepted): 22 Oktober 2017

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan strategi penanganan permukiman kumuh perkotaan. Kedudukan Kota Ternate sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi daya tarik tersendiri terhadap arus migrasi dan urbanisasi serta menjadi embrio perkembangan Kota Ternate, hal ini merekonstruksi perkembangan kantong-kantong kumuh yang cenderung berlokasi di sekitar kegiatan sosial ekonomi dan daerah pesisir khususnya di sekitar kawasan pelabuhan penyeberangan. Sumber daya inilah yang berkontribusi terhadap eksistensinya keberadaan kawasan permukiman kumuh Sangaji-Gamalama. Tipologi kawasan permukiman kumuh Sangaji - Gamalama merupakan kumuh di tepi air dan berada di pusat Kota Ternate. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*). Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan survei dengan menggunakan instrumen kuesioner terhadap beberapa responden di kawasan tersebut. Permukiman kumuh di Kota Ternate terkondisi akibat lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang serta peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan tidak optimal, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Kata Kunci : permukiman, kumuh, kota

A. PENDAHULUAN

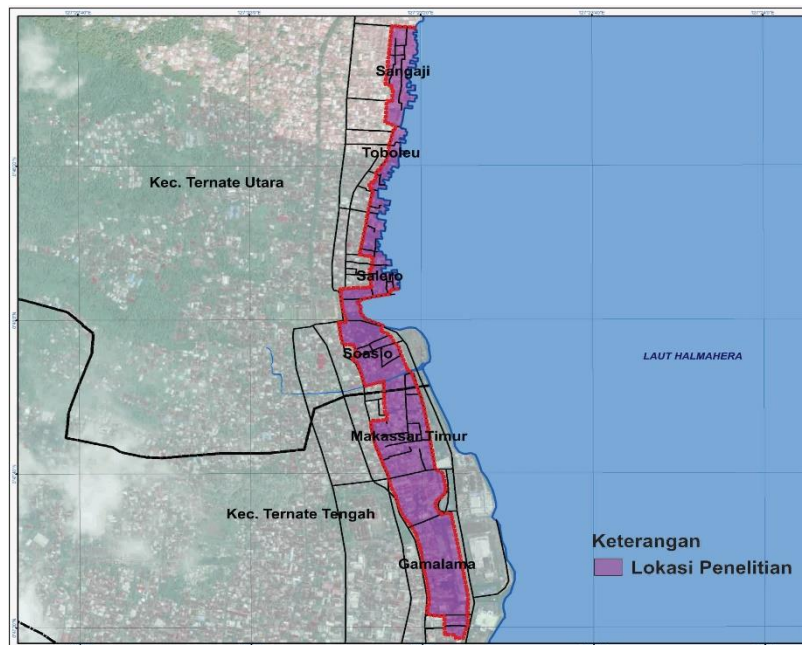
Pembangunan kota dan kawasan perkotaan, khususnya terkait dengan keberadaan kawasan permukiman kumuh perkotaan, diidentifikasi memerlukan penanganan dan pengendalian dari waktu ke waktu. Dalam dinamika pembangunan kawasan perkotaan menunjukkan 2 (dua) gejala yang berkembang secara bersamaan yaitu, perkembangan kawasan permukiman kumuh baik *slum* maupun *squatter* dan perkembangan kawasan permukiman yang terencana yang difasilitasi oleh pihak pengembang perumahan. Kedua hal tersebut terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar dan berjalan sejajar dengan dinamika perkembangan dan penambahan jumlah penduduk (Haryanto, 2010). Kondisi ini umumnya terjadi pada kota-kota utama di Indonesia yang mengalami perkembangan sangat cepat dan signifikan, termasuk dalam hal ini adalah kawasan perkotaan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akibat urbanisasi pada akhirnya berdampak pada tingginya kebutuhan akan penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan permukiman perkotaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur beserta fasilitasnya. Masalah permukiman perkotaan, semakin hari semakin kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain; perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan, urbanisasi, dan pengaruh ekonomi global. Faktor penyebab eksternal

yang paling menonjol di perkotaan adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk yang di dominasi oleh perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan (migrasi desa kota) dan urbanisasi sebagai akibat faktor daya tarik perkotaan.

Kawasan permukiman kumuh adalah bagian dari wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dengan tingkat permasalahan secara khusus dan keberadaannya perlu untuk mendapatkan penanganan secara spesifik baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan sistem infrastrukturnya. Pola penanganan terhadap kawasan tersebut memerlukan kajian secara mendalam dan spesifik dalam kerangka mengurangi dan mengatasi permasalahan kawasan permukiman perkotaan di Kota Ternate. Kondisi saat ini menunjukkan minimnya peran pemerintah Kota Ternate dalam penanganan permukiman kumuh yang cenderung deterministik dalam penanganan permukiman kumuh yang hanya terfokus pada penanganan fisik, tanpa mempertimbangkan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Kesalahan di dalam penyelesaian kawasan permukiman kumuh tersebut akan memberi implikasi yang luas dalam konteks pembangunan kawasan perkotaan secara umum, sehingga pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kota Ternate yang telah ditetapkan akan sulit tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui strategi yang komprehensif dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang diakibatkan dengan menyebarnya kantong-kantong kumuh di Kota Ternate.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu di Kota Ternate Provinsi Maluku utara tepatnya di Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Ternate Tengah, dengan pertimbangan persoalan permukiman kumuh yang berkembang di Kota Ternate yang berkontribusi secara positif terhadap penurunan kualitas lingkungan. Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena embrio perkembangan permukiman kumuh di Kota Ternate lebih kompleks dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tipologi keberadaan kawasan permukiman kumuh yang kemudian dikontekskan dalam penanganan kawasan melalui strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sangaji - Gamalama. Perkembangan permukiman kumuh yang pada dasarnya berkembang di kawasan pesisir bahkan kecenderungan berkembang di atas air laut serta membentuk pola di sekitar aktivitas sosial-ekonomi, proses ini menjadi ciri dan karakteristik permukiman kumuh di Kota Ternate. Oleh karena itu, sesuai dengan fokus kajian, maka tulisan ini bersifat *naturalistic*, *holistik*, dan *fenomenologi* (Creswell, 2012). Pendekatan penelitian yang dipilih adalah gabungan pendekatan kuantitatif-kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan kualitas data, dengan mengkaji dan menganalisis kondisi dan situasi yang berhubungan dengan permukiman kumuh, kualitas lingkungan permukiman, keberadaan sumber daya perkotaan, serta strategi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan secara spesifik. Pendekatan yang digunakan melihat persepsi masyarakat dalam pemilihan lokasi hunian menggunakan instrumen kuesioner pada 100 sampel dari 7.381 populasi dengan menggunakan rumus Taro Yamane (Sugiyono, 2012).



Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Sumber: Data Primer dan Citra Satelit, 2015

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kawasan

Kawasan kumuh perkotaan Kota Ternate yang telah ditetapkan melalui kebijakan Walikota Ternate berlokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatan antara lain; Kecamatan Ternate Utara (Kelurahan Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji dan Dufa-Dufa), Kecamatan Ternate Tengah (Kelurahan Gamalama dan Makassar Timur), Kecamatan Ternate Selatan (Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua dan Mangga Dua Utara). Secara administratif kajian terdiri atas 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara (Kelurahan Sangaji, Toboleu, Salero, dan Soasio) dan Kecamatan Ternate Tengah (Kelurahan Makassar Timur dan Gamalama), dengan luas kawasan 27,94 Ha. Karakteristik kawasan permukiman kumuh Sangaji dan Gamalama, sebagai berikut :

- Merupakan satu kesatuan kawasan kumuh yang terletak di daerah pasang surut,
- Terletak pada pusat kota, dan
- Akses jalan kawasan terhubung dengan pusat kota

Secara garis besar penggunaan lahan Kelurahan Sangaji - Gamalama merupakan penggunaan lahan terbangun (*urban*). Penggunaan lahan untuk kegiatan perkotaan berupa fasilitas pendidikan, permukiman, perkantoran, jasa, dan perdagangan, dimana peruntukan lahan yang paling dominan adalah kawasan permukiman dan perdagangan yang berkembang secara linier mengikuti pola jaringan jalan yang sudah terbentuk saat ini.

Kawasan ini merupakan kawasan yang mengalami perkembangan pesat dikarenakan pusat Kota Ternate terletak di lokasi tersebut serta berkembangnya

kawasan perdagangan dan jasa menjadi daya tarik tersendiri terhadap dinamika kota. Selain kedudukan di pusat kota, kawasan ini juga merupakan kawasan kumuh di daerah tepi air (kumuh daerah pasang surut) sehingga menjadi keunikan tersendiri dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Ternate.



Gambar 2. Karakteristik dan Kondisi Permukiman Kumuh
Sumber: observasi lapangan, 2015

Fenomena perkembangan kawasan permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang cenderung buruk serta minimnya pelayanan infrastruktur khususnya sarana persampahan dan sanitasi. Dominan masyarakat memanfaatkan drainase dan laut sebagai media pembuangan sampah dan limbah. Hal ini menyebabkan kondisi permukiman kumuh menjadi sporadis dan buruk dari segi kualitas lingkungannya. Selain itu, dampak secara langsung terhadap keberadaan kawasan permukiman kumuh dalam dimensi keruangan Kota Ternate, karena letak dan posisi kawasan permukiman kumuh yang berada pada daerah pesisir secara langsung berdampak pada pencemaran dan penurunan kualitas air laut. Kecenderungan permukiman kumuh yang berkembang saat ini pada daerah pesisir, berdampak pada tingginya beban pencemaran terhadap kualitas air laut dan jika tidak dikendalikan akan mengondisikan degradasi kualitas lingkungan hidup Kota Ternate dari waktu ke waktu. Faktor penyebab utama munculnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sebagai berikut:

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan dan koefisien Dasar Bangunan (KDB), sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih/minum, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase dan jalan.

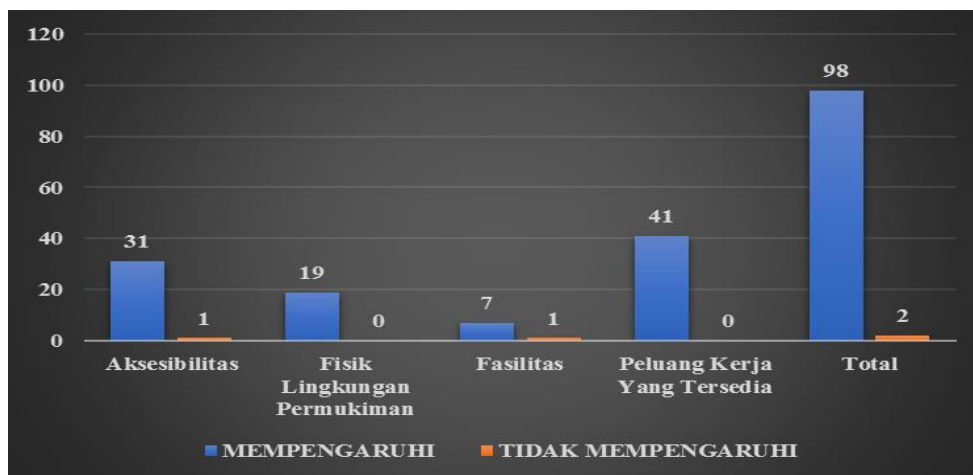
b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Dalam konteks penanganan kawasan permukiman kumuh hubungannya dengan dimensi

keruangan Kota Ternate akan terkait dengan aspek fisik/lingkungan, ekonomi, sosial, kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Kondisi ini memberi pemahaman bahwa potensi yang terbangun dalam masyarakat cukup kuat sebagai dasar untuk pembangunan *human capital* dan *social capital* dalam sistem perkotaan Kota Ternate. Modal sosial adalah kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan sosial anak-anak atau pemuda (Coleman, 2011).

2. Eksistensi Perkembangan Kawasan Permukiman Kumuh

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangannya peluang untuk mencari nafkah di daerah perdesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik yang sangat kuat untuk mengadu nasibnya di kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi, sementara pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki kurang memadai untuk masuk disektor formal (Yunus, 2005). Berdasarkan persepsi responden terhadap pemilihan lokasi permukiman dengan kedekatan aktivitas - aktivitas kota terkait orientasi mata pencaharian dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Persepsi responden terhadap pemilihan lokasi bermukim
Sumber : analisis, 2015

Persepsi responden terhadap pemilihan lokasi untuk bermukim yaitu aspek peluang tempat kerja sangat mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim responden dengan nilai 41 dan Aksesibilitas dengan nilai 31. Hal ini menunjukkan masyarakat yang bermukim di kawasan permukiman kumuh dominan melakukan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan permukiman yang berorientasi dengan pasar tradisional, pelabuhan, pusat kegiatan ekonomi dan terminal. Eksistensi permukiman kumuh di Kota Ternate akibat ketersediaan sumber daya sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim akibat peluang kerja dan aksesibilitas tinggi yang dilintasi oleh jaringan jalan utama Kota Ternate. Fenomena kumuh yang nampak pada kawasan permukiman memiliki

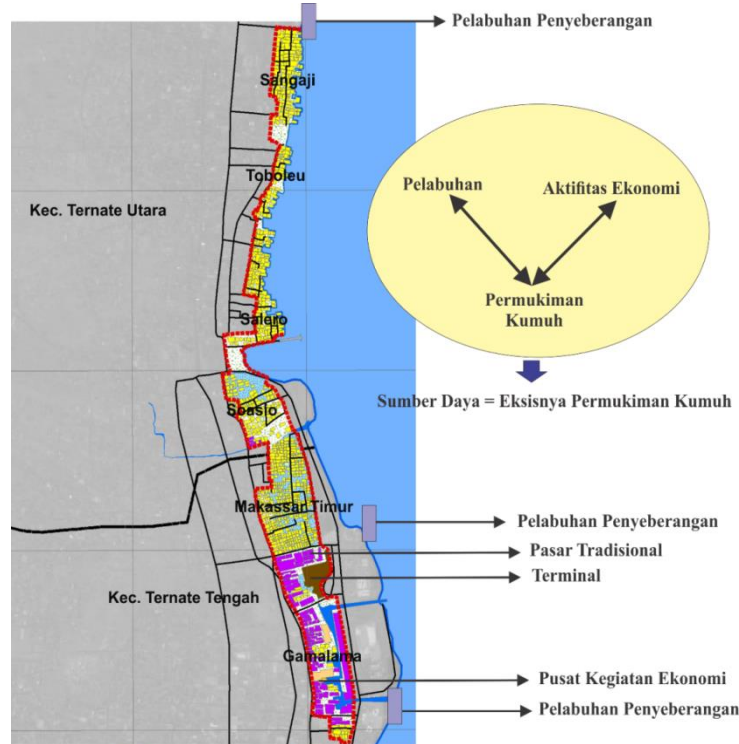
Fasri Bachmid dan Ariyanto, Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate

kecenderungan kualitas lingkungan tidak layak khususnya sanitasi dan sistem persampahan yang cenderung memanfaatkan laut sebagai media pembuangan sampah atau limbah.



Gambar 5. Kondisi sanitasi permukiman
Sumber: observasi lapangan, 2015

Perkembangan kawasan permukiman kumuh perkotaan terkondisi oleh beberapa faktor yaitu (1) lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan berkembangnya ruang-ruang marjinal perkotaan yang terkondisi akibat kemiskinan masyarakat; (2) lemahnya pengelolaan kota, dalam hal keterpaduan di dalam pelaksanaan program-program pembangunan; (3) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan belum dilaksanakan secara optimal dan bersifat partisipatif; dan (4) pengintegrasian penanggulangan kemiskinan perkotaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan belum berjalan efektif dan kecenderungannya masih bersifat parsial (Surya, 2015).



Gambar 4. Eksistensi kawasan permukiman kumuh Sangaji - Gamalama

3. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Sangaji-Gamalama

Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dapat mejadi pertimbangan antara lain

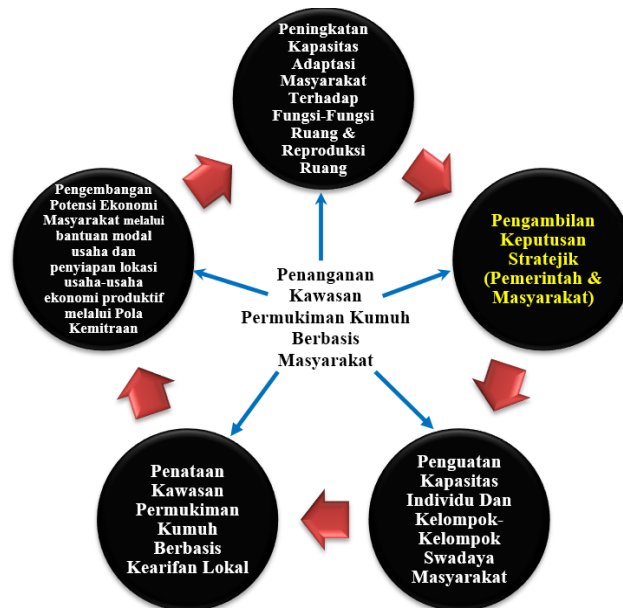
- a. Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan berbasis kearifan lokal. Penanganan kawasan permukiman kumuh perlunya diperhatikan karakteristik sosial-budaya yang ada dikawasan permukiman kumuh Sangaji-Gamalama, dengan mempertimbangkan proses pembentukan sistem sosial yang cenderung *multi-culture*, sehingga konteks penanganan kawasan permukiman kumuh akan memerlukan pertimbangan kemajemukan masyarakat sebagai potensi dan bagian dari proses modernisasi pembangunan kawasan perkotaan Kota Ternate. Prinsip kemajemukan ini didasari oleh pemikiran bahwa heterogenitas masyarakat yang menghuni kawasan permukiman kumuh telah mengalami proses akulturasi budaya yang dibawa dari daerah asal kaum urbanis, sehingga konteks nilai dan norma yang dibangun telah mengalami perubahan dari nilai-nilai tradisi yang bersifat tradisional kemudian bergerak ke arah budaya industrial perkotaan, sehingga pola-pola hubungan sosial terbangun atas dasar kesamaan prinsip untuk hidup bersama dalam kerangka meraih peluang-peluang ekonomi perkotaan. Terdapat 5 dampak negatif perubahan sosial yang perlu dicermati, yaitu peningkatan angka kemiskinan, jumlah pengangguran semakin tinggi, peningkatan angka kriminalitas, konflik sosial dan individualitas semakin meningkat (Nartono, 1984). Oleh karena itu, penanganan kawasan permukiman kumuh diperlukan penanganan berbasis kearifan lokal dalam suatu sistem penanganan kawasan permukiman kumuh.
- b. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan penyiapan lokasi kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif melalui pola kemitraan. Konteks penanganan permukiman Kumuh Sangaji-Gamalama memerlukan penanganan ekonomi secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada serta kemampuan komunitas lokal yang bermukim, agar kesejahteraan komunitas dapat meningkat. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan modal serta bimbingan penguasaan teknologi untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dibangun melalui pola kemitraan sebagai suatu kesatuan sistem ekonomi perkotaan. Hal ini dipahami bahwa peningkatan kesejahteraan komunitas akan meningkat apabila didukung dengan keahlian dan keterampilan yang memadai. Pencapaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terpenuhi, jika ada usaha kreativitas yang berkembang yang sepenuhnya didukung oleh teknologi dan pola kemitraan usaha. Sistem sosial eksis sebagai praktik-praktik yang direproduksi. Sistem sosial tidak memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri, reproduksi tersebut adalah proses yang penuh kemungkinan dan didasarkan pada aktivitas pelaku. Masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan untuk berprestasinya, umumnya akan menghasilkan wiraswastawan yang lebih bersemangat dan selanjutnya menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Keberlanjutan ekonomi komunitas akan berkembang seiring dengan

modernisasi pembangunan dan perubahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan (Gidden, 1984).

- c. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap fungsi-fungsi ruang dan reproduksi ruang perkotaan. Perubahan pemanfaatan ruang kota akan selalu berjalan sejajar dengan dinamika penduduk dan dinamika reproduksi ruang perkotaan akan selalu menjadi arena yang diperebutkan. Hal ini dipahami bahwa perubahan sarana produksi menuju reproduksi ruang akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan tidak menjadi proses yang berulang. Maka sangat penting untuk melakukan upaya proteksi ruang-ruang masyarakat marginal dan miskin perkotaan yang berada dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk tetap menjaga eksistensinya. Proteksi ini diperlukan sebagai bagian adaptasi masyarakat untuk tetap eksis dalam dinamika perubahan fungsi-fungsi ruang perkotaan. Kebijakan pembangunan Kota Ternate sangat penting dalam konteks pembaharuan kota untuk berpihak terhadap keberadaan masyarakat marginal dan miskin secara ekonomi dan tidak dalam konteks mengembangkan kawasan perkotaan melalui praktik spasial orang miskin dan marginal yang diubah secara radikal melalui representasi ruang dengan cara menciptakan, dan mengimplementasikan pembaharuan kota. Representasi ruang elit terlalu mendominasi praktik spasial dan ruang representasional sehari-hari (Hasim, Sahabu, & Asri, 2015). Maka dengan ini dipahami bahwa kawasan perkotaan Kota Ternate dalam perkembangannya akan bersifat dinamis, sehingga perubahan pemanfaatan ruang akan berjalan sejajar dengan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap fungsi-fungsi ruang yang baru.
- d. Pengambilan keputusan strategis (pemerintah dan masyarakat). Keberadaan masyarakat miskin dan marginal yang berada dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan, tidak dipandang sebagai masalah perkotaan akan tetapi mendudukan masyarakat sebagai potensi untuk ikut serta dalam pembangunan melalui partisipasinya. Konsep pembangunan perkotaan didudukan sebagai landasan keberpihakan. Summer menyebutkan bahwa ada 4 falsafah hubungan antara pengambilan keputusan sebagai kelompok strategis dunia luar, yaitu; (1) pertanggungjawaban etis para perancang strategi di dalam masyarakat, yaitu bagaimana mengintegrasikan organisasi dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, (2) pertanggungjawaban dalam tubuh organisasi, bahwa organisasi adalah instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, (3) pertanggungjawaban sosial yaitu *the pluralistik role*. Kelompok strategis didorong untuk menghilangkan tuduhan bahwa produk dan pelayanan organisasinya kurang baik atau kurang cocok dengan keinginan masyarakat, (4) *the judgemen role*, bahwa pemimpin organisasi berperan sebagai juru damai etik bagi pihak-pihak yang bertentangan (Salusu, 2015). Terhadap 4 hal tersebut memberi pemahaman bahwa dalam konteks pembangunan kota, dan secara khusus terhadap penanganan kawasan kumuh perkotaan Kota Ternate, memberi gambaran bahwa kedudukan masyarakat melalui proses *button up planning* sangat penting, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap eksistensi masyarakat miskin dan marginal untuk

bermukim di kota atau kawasan perkotaan melalui proses pengambilan keputusan strategis, sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan.

- e. Penguatan kapasitas individu dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Proses ini dimaknai sebagai proses pembangunan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dipahami sebagai proses perubahan masyarakat, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku (Soetomo, 2010). Peningkat kapasitas individu dan swadaya masyarakat melalui proses partisipasi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Ternate akan mendorong proses perubahan yang dikehendaki, baik dalam hal sikap, perilaku maupun tanggungjawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.



Gambar 6. Penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis masyarakat
Sumber : Surya, 2015

Berangkat dari pemikiran terkait konsep penanganan permukiman kumuh perkotaan diatas serta mempertimbangkan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal sebagai bagian dari dinamika pembangunan kawasan perkotaan Kota Ternate yang menjadi karakteristik serta persoalan dan isu permukiman kumuh, maka strategi yang diusulkan, sebagai berikut:

1. Menata kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai potensi kawasan.
2. Pengendalian kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan didukung dengan ketersediaan RTH sebagai suatu kesatuan sistem pembangunan ruang perkotaan Kota Ternate.

3. Mengoptimalkan potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan komunitas lokal melalui bantuan modal usaha serta pelatihan bimbingan usaha ekonomi produksi bagi masyarakat miskin melalui pola kemitraan secara berkelanjutan.
4. Pelibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman perkotaan.
5. Implementasi aturan dalam mendirikan bangunan agar dalam perkembangan kawasan permukiman tidak berkembang di daerah pasang surut serta penyiapan lahan untuk pembangunan permukiman perkotaan.
6. Pengembangan kapasitas adaptasi masyarakat miskin dan marginal terhadap perubahan fungsi-fungsi ruang perkotaan melalui upaya pendayagunaan potensi angkatan kerja produktif dan pengembangan wirausaha masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Penyediaan usaha-usaha ekonomi baru sektor formal yang mendukung ketersediaan tenaga kerja yang ada di kawasan permukiman kumuh.
8. Penguatan kapasitas individu dan kelompok-kelompok masyarakat lokal dan miskin perkotaan, melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
9. Pengambilan keputusan strategis, mengacu pada prinsip pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkeadilan.
10. Membangun dan mengembangkan kawasan melalui prinsip kesetaraan dan berkeadilan melalui pola distribusi aktivitas sosial-ekonomi dan infrastruktur dasar dalam kerangka mengurangi disparitas pelayanan antarkawasan perkotaan.

D. KESIMPULAN

Eksistensi perkembangan kawasan permukiman kumuh Sangaji - Gamalama diakibatkan oleh aktivitas sosial ekonomi dan pelabuhan sebagai sumber daya yang menjadi peluang pekerjaan bagi masyarakat urban sehingga menjadi daya tarik untuk bermukim di sekitar aktivitas ekonomi Kota Ternate yang berdampak pada kualitas lingkungan dan pola hidup bersih sehingga merekonstruksi perkembangan kawasan permukiman kumuh Sangaji-Gamalama. Tipologi kawasan permukiman kumuh berdasarkan karakteristik lokasi menunjukkan tipologi kumuh di tepi air (daerah pesisir) dan merupakan kumuh di pusat kota (dekat kegiatan sosial ekonomi), sehingga strategi penanganan kawasan permukiman kumuh yang berkembang pada kawasan yang didominasi masyarakat *multi-culture*, dibutuhkan strategi penanganan kawasan berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal dalam pengendalian dan penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J. S. (2011). *Fundamentos de Teoria Social*. Italia: CIS.
- Creswell, J. W. (2012). *Collecting Qualitative Data, Educational Research ; Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson: Fourth Ed Boston.

Fasri Bachmid dan Ariyanto, Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. USA: University of California Press.
- Haryanto, A. (2010). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Permukiman yang Sehat. *Jurnal PWK Unisba*, 11-37.
- Hasim, D. H., Sahabu, B., & Asri, M. (2015). Conflict Management Resource in Village Pangumbahan, Sukabumi. *Sodality; Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 17-29.
- Nartono, N. (1984). *Sosiologi Perubahan Sosial ; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Neoloka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soetomo. (2010). *Strategi strategi Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.
- Surya, B. (2015). Modernization in the Development of a Town and Community-Based Management Strategy of Slum Areas: A Case Study: Urban Slum Areas of Sangatta, East Kutai Regency. *Economia, Seria Management*, 177-195.
- Yunus, H. S. (2005). *Manajemen Kota ; Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.